

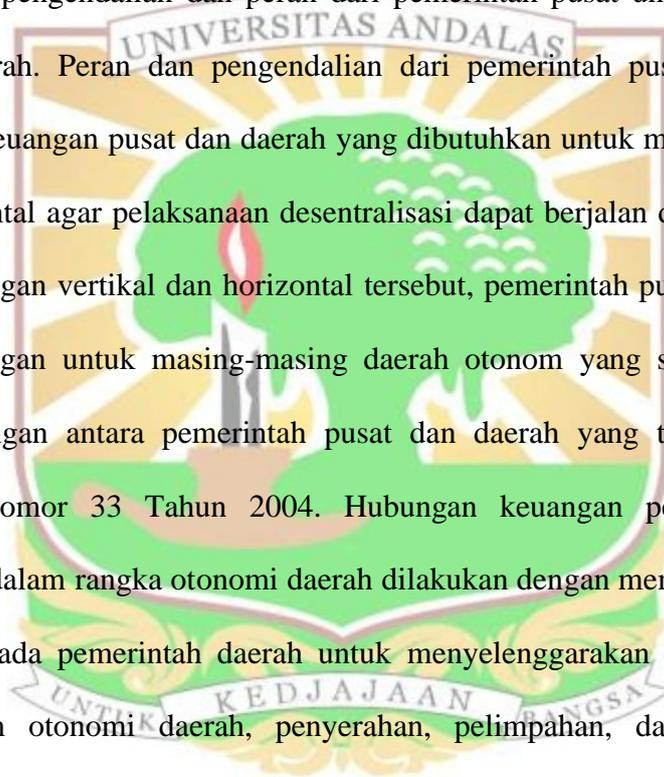
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu upaya bagi pemerintah untuk mengembangkan daerahnya. Salah satu tujuan dari pembangunan diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena luasnya cakupan, maka tidak mungkin pemerintah pusat saja yang menangani. Maka dari itu perlu adanya keikutsertaan pemerintah daerah dalam mensukseskannya. Karena pemerintah daerah lebih tahu mengenai kondisi dan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat di daerahnya. Karena itu timbul dengan namanya otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, tentu terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah munculnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada awalnya pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah bersifat sentralisasi, maksudnya segala urusan pusat dan daerah dikelola oleh pemerintah pusat, namun setelah berlakunya otonomi daerah pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berubah menjadi desentralisasi yang berarti bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerahnya. Pelaksanaan desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua 2 tujuan yang nyata, diantaranya adalah pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber

daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang mempunyai informasi yang lebih lengkap (Mardiasmo, 2004). Otonomi dan desentralisasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan setempat sesuai dengan keinginan dan prioritas masyarakat tersebut karena masyarakat daerah setempat tersebutlah yang lebih mengetahui kondisi daerah mereka dan kebutuhan daerah mereka sendiri. Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan terciptanya keadilan antar daerah. Dalam hal ini dibutuhkan adanya pengendalian dan peran dari pemerintah pusat untuk mewujudkan rasa keadilan antar daerah. Peran dan pengendalian dari pemerintah pusat dapat dilihat dari adanya hubungan keuangan pusat dan daerah yang dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan horizontal agar pelaksanaan desentralisasi dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan horizontal tersebut, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan keuangan untuk masing-masing daerah otonom yang sesuai dengan prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara bertanggung jawab, harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Dalam hal pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada otonomi daerah agar tercipta efisiensi dan efektivitas, maka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat dibiayai dengan APBN. Ini merupakan wujud dari adanya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.



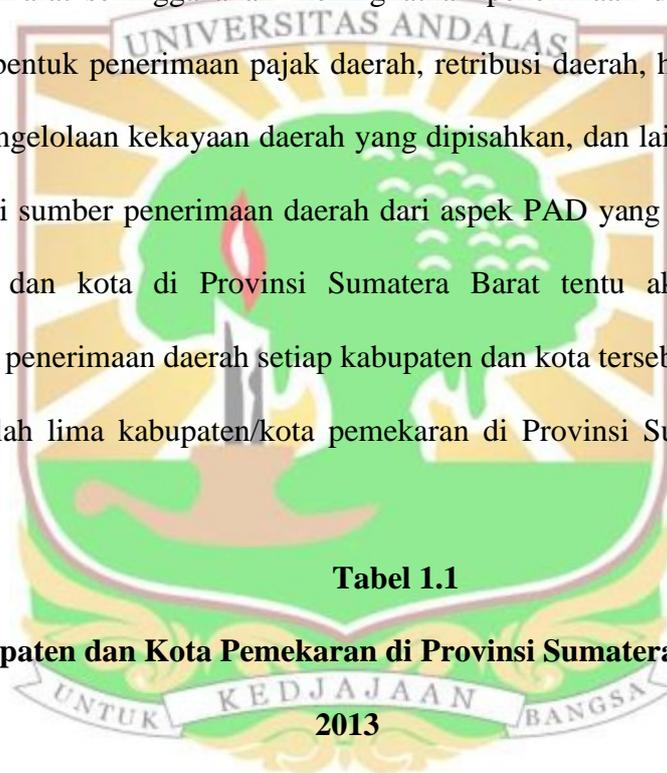
Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan tercapainya kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimilikinya dan mengurangi adanya ketimpangan daerah. Sehingga daerah akan selalu meningkatkan kreatifitas dan inovasi untuk memperoleh pendapatan daerahnya. Kemandirian daerah merupakan hasil dari pelaksanaan otonomi daerah yang sangat erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu dihasilkan oleh suatu daerah tersebut. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 disebutkan bahwasanya sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sumber-sumber penerimaan daerah inilah pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan pembangunan dan pemerintahannya khususnya penerimaan PAD disamping dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat. PAD inilah yang akan menjadi titik tolak berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dalam meningkatkan kemandirian daerah.

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah otonom di Indonesia yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Dari 12 kabupaten dan 7 kota tersebut ada diantaranya kabupaten/kota pemekaran. Diantaranya yaitu Kabupaten Dharmasraya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Pasaman Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Pasaman. Kabupaten Solok Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Solok dan Kota Pariaman merupakan pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman.

Salah satu tujuan dari pemekaran ini adalah pemerataan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah ini, tentunya dibutuhkan sumber pendanaan. Salah satu dari sumber pendanaanya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki banyak potensi sumber daya yang bisa dijadikan sebagai PAD. Potensi sumber daya ini meliputi pertambangan, pertanian/perkebunan, kehutanan, kelautan/perikanan, dan industri/ jasa. Sumber daya ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek PAD dalam bentuk penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Beragamnya potensi sumber penerimaan daerah dari aspek PAD yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tentu akan berdampak pada beragamnya jumlah penerimaan daerah setiap kabupaten dan kota tersebut.

Berikut adalah lima kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Sumatera Barat beserta daftar PAD nya.



Tabel 1.1

Daftar PAD Kabupaten dan Kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2013

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	KABUPATEN/ KOTA	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Dharmasraya	25,120	25,573	34,423	39,201	32,902
2	Kab. Kep. Mentawai	29,188	28,324	37,725	34,639	31,302
3	Kab. Pasaman Barat	23,457	24,205	28,647	32,494	37,827
4	Kab.Solok Selatan	11,937	7,361	14,801	22,055	22,225

5	Kota Pariaman	12,263	14,885	17,048	17,579	20.639
---	---------------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, data diolah

Dilihat dari daftar PAD diatas, jumlah PAD pada kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan pada tahun berjalan. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan tujuan dilakukanya wilayah pemekaran yang salah satunya adalah meningkatkan jumlah PAD.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota pemekaran pada Provinsi Sumatera Barat tersebut dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kemandirian daerah pada Kabupaten/Kota pemekaran di provinsi Sumatera Barat selama tahun 2009-2013?
2. Bagaimanakah Rasio Efektivitas Penerimaan PAD pada Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2013?
3. Bagaimanakah pertumbuhan (*growth*) penerimaan PAD pada Kabupaten/Kota pemekaran di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2013?
4. Bagaimanakah Peran (*share*) PAD terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota pemekaran di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kemandirian daerah pada Kabupaten/Kota pemekaran di provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2013.
2. Untuk mengetahui Rasio Efektivitas Penerimaan PAD pada kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Barat tahun 2009-2013.

3. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan penerimaan PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2013.
4. Untuk mengetahui bagaimana *share* PAD terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota pemekaran di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait kinerja keuangan daerah.
2. Bagi Instansi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan perbandingan, dan acuan dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

- a. Bab I, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan
- b. Bab II, berisi tentang Teori Otonomi Daerah, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Sumber Penerimaan Daerah, PAD, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Daerah, serta Review Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir.
- c. Bab III, berisi tentang Desain Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.
- d. Bab IV, berisi tentang Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan.

- e. Bab V, bagian penutup yang berisi Kesimpulan Penelitian, Implikasi Penelitian, dan Saran.

